

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dēmos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara konseptual dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Mufti, 2012). Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme elektoral, tetapi juga oleh kualitas kesadaran, pemahaman, dan orientasi politik warga negara terhadap sistem dan lembaga politik yang ada. Tanpa pemahaman politik yang memadai, demokrasi berisiko berjalan secara prosedural tanpa substansi.

Dalam konteks tersebut, pemilu menjadi arena utama interaksi antara warga negara dan lembaga politik. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan persepsi politik masyarakat terhadap lembaga-lembaga perwakilan (Alva et al., 2025). Persepsi politik menjadi penting karena memengaruhi bagaimana warga negara memaknai peran, fungsi, dan relevansi lembaga politik dalam sistem demokrasi. Persepsi yang lemah atau keliru terhadap suatu lembaga dapat berdampak pada rendahnya kualitas dukungan politik dan legitimasi lembaga tersebut, meskipun secara prosedural pemilu berlangsung dengan tingkat kehadiran pemilih yang tinggi (Dharmawan, 2025).

Dalam perspektif teori sistem politik David Easton, persepsi dan penilaian publik terhadap lembaga politik merupakan bagian dari *political support* yang menentukan keberlangsungan dan legitimasi lembaga tersebut dalam sistem demokrasi (Easton, 1965). Dengan demikian, kualitas demokrasi elektoral tidak hanya dapat dibaca dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari sejauh mana pemilih memiliki pemahaman dan persepsi politik yang memadai terhadap lembaga-lembaga politik yang dipilih (Arini, 2024).

Salah satu lembaga politik yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Secara

konstitusional, DPD RI dibentuk untuk merepresentasikan kepentingan daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional (Hestu & Handoyo, 2024). Namun demikian, keterbatasan kewenangan legislatif DPD RI, khususnya tidak adanya hak persetujuan undang-undang, sering kali menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman publik mengenai peran dan signifikansi lembaga ini dalam sistem politik nasional (Dirkareshza, 2019).

Selain keterbatasan kewenangan, karakteristik DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang bersifat independen dan non-partai politik turut memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaannya (Manan, 2021). Berbeda dengan anggota DPR dan DPRD yang diusung oleh partai politik, anggota DPD RI dipilih melalui jalur perseorangan tanpa afiliasi formal dengan partai politik (A. R. Saputra, 2022). Secara normatif, desain kelembagaan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi DPD RI agar mampu merepresentasikan kepentingan daerah secara lebih murni. Namun, dalam praktik demokrasi elektoral, ketiadaan dukungan partai politik sering kali berimplikasi pada rendahnya visibilitas politik, terbatasnya sosialisasi yang terstruktur, serta lemahnya proses pengenalan publik terhadap peran dan fungsi DPD RI (W. S. Saputra, 2024).

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik pemilu, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi prosedural dan kualitas pemahaman pemilih terhadap lembaga politik yang dipilih.



Gambar 1. Data surat suara DPD tidak sah Pemilu 2019

Sumber: Kompas TV

Pada Pemilu 2019, secara nasional tercatat sekitar 17 juta surat suara tidak sah atau sekitar 11,12% dari total suara, menjadikan pemilihan anggota

DPD RI sebagai jenis pemilihan dengan tingkat suara tidak sah tertinggi dibandingkan pemilihan lainnya.



Gambar 2 Data surat suara DPD tidak sah Pemilu Jawa Barat 2024

Sumber: JPNN.com

Kondisi serupa kembali terjadi pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat, di mana jumlah suara tidak sah mencapai 5.617.283 suara atau sekitar 19,1%, meskipun tingkat partisipasi pemilih meningkat hingga 81,49%. Data ini menunjukkan adanya paradoks antara partisipasi elektoral secara kuantitatif dan kualitas partisipasi politik secara substantif. Dengan kata lain, persoalan utama tidak terletak pada kehadiran pemilih, melainkan pada sejauh mana pemilih memahami objek politik yang dipilih.



Gambar 3 Data survei pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran DPD RI Jawa Barat 2018

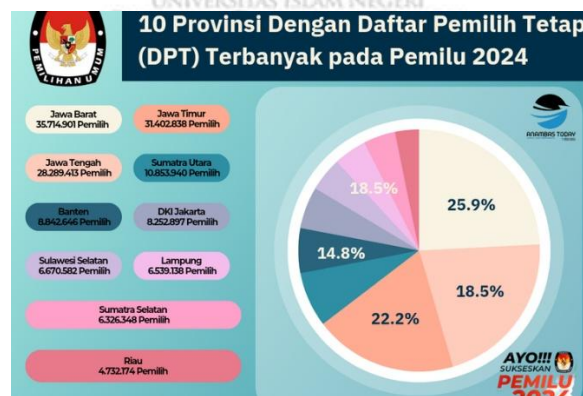
Sumber: Survei Paciba Research Centre (2018)

Rendahnya kualitas persepsi politik pemilih terhadap DPD RI juga diperkuat oleh temuan Survei Paciba Research Centre (2018) yang menunjukkan bahwa sekitar 70% responden di Jawa Barat tidak memahami fungsi dan

kewenangan DPD RI, meskipun sebagian besar mengetahui keberadaannya. Bahkan, sebagian responden masih menyamakan peran DPD RI dengan DPRD. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengetahuan formal dan pemahaman substantif pemilih terhadap lembaga perwakilan daerah.

Kesenjangan informasi ini semakin dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Herdiana (2025) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengalami keterbatasan akses informasi terkait profil kandidat. Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa banyak pemilih bahkan hingga hari pemungutan suara tidak mengetahui jumlah calon anggota DPD RI Jawa Barat yang mencapai 54 orang, serta tidak memiliki referensi yang cukup mengenai sosok yang akan dipilih.

Kondisi ini dipicu oleh intensitas kampanye yang sangat minim, tidak ditemukannya alat peraga kampanye (APK) yang memadai dibandingkan dengan calon dari partai politik, serta kurangnya sosialisasi visi-misi kandidat. Fenomena ini menunjukan bahwa pemilih dihadapkan pada tantangan beban informasi (*information overload*) yang ekstrem, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemilih untuk membangun persepsi berbasis kapasitas, sehingga pilihan lebih banyak didasarkan pada popularitas figur yang sudah dikenal sebelumnya.



Gambar 4 Data DPT Pemilu Jawa Barat 2024

Sumber: anambas.pikiran-rakyat.com

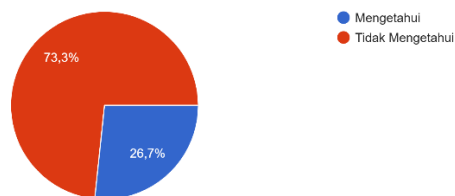
Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, persoalan ini menjadi semakin penting mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih

terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 35 juta pemilih, serta didominasi oleh pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z. Kondisi ini menjadikan kualitas persepsi politik pemilih muda sebagai faktor strategis dalam menentukan kualitas demokrasi ke depan.

Dalam konteks tersebut, salah satu kelompok yang relevan untuk dikaji adalah mahasiswa sebagai bagian dari pemilih muda terdidik. Mahasiswa memiliki akses terhadap informasi, ruang diskusi akademik, serta pengalaman intelektual yang memungkinkan terbentuknya persepsi politik yang lebih reflektif. Secara khusus, mahasiswa Ilmu Politik memiliki keunggulan karena secara akademik mempelajari sistem politik, lembaga negara, dan dinamika demokrasi.

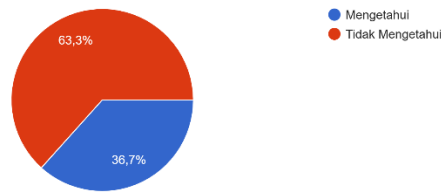
Meskipun secara teoretis mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman politik yang lebih baik, dalam praktiknya kondisi tersebut tidak selalu sepenuhnya tercermin. Hasil studi pendahuluan (pra-survei) terhadap 30 mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan adanya variasi persepsi yang cukup kontras terhadap DPD RI Jawa Barat dalam konteks Pemilu 2024.

Apakah Anda mengetahui bahwa calon anggota DPD RI Jawa Barat maju melalui jalur perseorangan (independen) tanpa partai politik?
30 jawaban



Gambar 5 Data Pra-Survey
Sumber: Diolah peneliti 2026

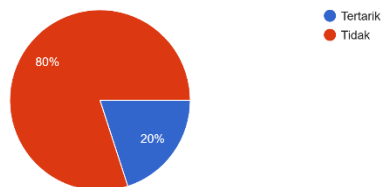
Apakah Anda mengetahui calon anggota DPD RI Jawa Barat yang mengikuti Pemilu 2024?
30 jawaban



Gambar 6 Data Pra-Survey
Sumber: Diolah peneliti 2026

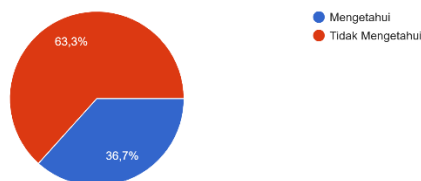
Berdasarkan hasil pra-survei, sebanyak 73,3% mahasiswa tidak mengetahui bahwa calon anggota DPD RI Jawa Barat maju melalui jalur perseorangan (independen) tanpa partai politik. Selain itu, 63,3% mahasiswa juga tidak mengetahui calon anggota DPD RI Jawa Barat yang mengikuti Pemilu 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa relatif mengenal DPD RI sebagai lembaga negara, namun masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai karakteristik dan kandidat DPD RI Jawa Barat dalam konteks pemilu.

Apakah Anda tertarik mencari informasi mengenai calon anggota DPD RI Jawa Barat sebelum Pemilu 2024?
30 jawaban



Gambar 7 Data Pra-Survey
Sumber: Diolah peneliti 2026

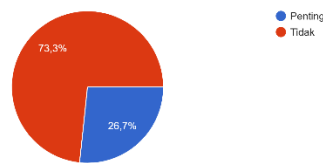
Apakah Anda memahami perbedaan fungsi dan kewenangan DPD RI dengan DPR RI?
30 jawaban



Gambar 8 Data Pra-Survey
Sumber: Diolah peneliti 2026

Keterbatasan pemahaman tersebut juga terlihat pada aspek kelembagaan. Sebanyak 63,3% mahasiswa mengaku belum memahami perbedaan fungsi dan kewenangan DPD RI dengan DPR RI. Di sisi lain, 80% mahasiswa menyatakan tidak tertarik mencari informasi mengenai calon anggota DPD RI Jawa Barat sebelum Pemilu 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian mahasiswa terhadap kontestasi DPD RI Jawa Barat masih relatif rendah meskipun mereka merupakan kelompok pemilih terdidik.

Menurut Anda, apakah memilih anggota DPD RI Jawa Barat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah?
30 jawaban



Gambar 9 Data Pra-Survey
Sumber: Diolah peneliti 2026

Menariknya, meskipun tingkat pengetahuan dan ketertarikan terhadap DPD RI Jawa Barat masih terbatas, sebanyak 73,3% responden justru menilai bahwa memilih anggota DPD RI Jawa Barat tidak penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya representasi daerah dengan pengetahuan mereka mengenai lembaga dan kandidat DPD RI Jawa Barat.

Hal ini juga di konfirmasi dari (pra-survei) wawancara terhadap lima mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan adanya variasi persepsi yang cukup kontras terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Pemilu 2024, Sebagian mahasiswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai keberadaan dan fungsi DPD RI Jawa Barat sebagai lembaga perwakilan daerah. Namun demikian, sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas, baik terkait fungsi, kewenangan, maupun posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh mahasiswa Ilmu Politik memiliki tingkat pemahaman yang merata terhadap DPD RI Jawa Barat.

Selain itu, hasil pra-survei juga menunjukkan bahwa mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum memiliki referensi yang memadai mengenai calon anggota DPD RI Jawa Barat. Beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi menyebabkan mereka kesulitan mengenali kandidat yang akan dipilih. Akibatnya, dalam proses pengambilan keputusan, terdapat kecenderungan memilih berdasarkan tingkat keterkenalan figur dibandingkan pertimbangan program dan kapasitas kandidat.

Di sisi lain, muncul pula penilaian kritis dari mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mempertanyakan efektivitas peran DPD RI Jawa Barat dalam sistem perwakilan daerah. Selain itu, muncul pula penilaian kritis yang menganalogikan peran DPD RI Jawa Barat layaknya *'penonton dalam permainan catur'* yang tidak memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan serta memiliki kewenangan yang dianggap sangat terbatas dalam proses legislasi. Pandangan ini menunjukkan adanya kecenderungan sikap skeptis terhadap peran dan signifikansi DPD RI Jawa Barat sebagai lembaga perwakilan daerah. Variasi persepsi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat mahasiswa merupakan bagian dari pemilih terdidik yang memiliki posisi strategis dalam konteks pembentukan kualitas demokrasi di masa depan.

Meskipun demikian, temuan dalam studi pendahuluan ini bersifat eksploratif dan tidak dapat digeneralisasikan, mengingat jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, hasil pra-survei ini hanya memberikan gambaran awal mengenai kemungkinan adanya variasi persepsi mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat. Temuan awal tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut secara sistematis dan komprehensif untuk mengkaji bagaimana persepsi politik mahasiswa terbentuk, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan persepsi tersebut.

Perbedaan persepsi politik tersebut pada dasarnya tidak muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam kehidupan individu. Proses ini terjadi melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, lingkungan pergaulan, media massa, serta institusi pendidikan

yang membentuk cara individu memahami sistem politik dan lembaga negara. Oleh karena itu, untuk memahami variasi persepsi mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat, penting untuk melihat faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut dalam konteks pengalaman sosial dan informasi politik yang mereka terima.

Di sisi lain, kajian mengenai DPD RI selama ini masih didominasi oleh pendekatan kelembagaan dan normatif. Penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi politik pemilih terhadap DPD RI, terutama dalam konteks Pemilu di Jawa Barat, masih relatif terbatas. Padahal, persepsi politik pemilih merupakan elemen penting dalam menentukan kualitas legitimasi lembaga perwakilan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi empiris (*das sein*) dan kondisi normatif yang diharapkan (*das sollen*) dalam praktik demokrasi elektoral, khususnya dalam pemilihan anggota DPD RI Jawa Barat. Secara normatif, pemilu diharapkan tidak hanya menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi juga didukung oleh pemahaman yang memadai dari pemilih terhadap lembaga dan kandidat yang dipilih. Namun, secara empiris menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemilih tinggi, kualitas pemahaman terhadap DPD RI masih terbatas, yang tercermin dari tingginya suara tidak sah, keterbatasan informasi kandidat, serta lemahnya pemahaman terhadap fungsi lembaga.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan mahasiswa Ilmu Politik sebagai kelompok pemilih terdidik. Secara teoretis, mahasiswa Ilmu Politik diharapkan memiliki persepsi politik yang lebih matang dan reflektif. Namun, temuan awal justru menunjukkan adanya variasi persepsi, keterbatasan pemahaman, serta kecenderungan membangun pilihan berdasarkan keterkenalan, bukan pemahaman substantif.

Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan tingkat persepsi mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat, tetapi juga untuk mengungkap bagaimana persepsi tersebut terbentuk serta sejauh mana persepsi tersebut mencerminkan pemahaman yang substantif dalam konteks Pemilu 2024. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara persepsi politik

mahasiswa dengan faktor-faktor yang membentuknya, sekaligus melihat kualitas pemahaman yang menyertainya sebagai bagian dari dukungan politik (*political support*) terhadap lembaga perwakilan daerah.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diarahkan pada persepsi politik terhadap DPD RI Jawa Barat, khususnya pada mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam konteks Pemilu 2024. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan aspek partisipasi, perilaku memilih, atau kewenangan normatif lembaga, penelitian ini secara spesifik menggambarkan persepsi politik terhadap DPD RI Jawa Barat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang DPD RI sekaligus memberikan perspektif alternatif dalam membaca kualitas demokrasi elektoral melalui dimensi persepsi politik pemilih terhadap lembaga perwakilan daerah.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini memfokuskan pada mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdaftar sebagai pemilih di Daerah Pemilihan Jawa Barat pada Pemilu 2024. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa persepsi yang dianalisis lahir dari pengalaman elektoral langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi politik mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut dalam konteks pemilu 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kualitas dukungan politik terhadap lembaga perwakilan daerah serta memperkaya kajian mengenai demokrasi elektoral di Indonesia.

Mengingat pentingnya memahami kualitas dukungan politik (*political support*) bagi legitimasi lembaga negara khususnya dalam konteks DPD RI Jawa Barat dalam Pemilu 2024, maka peneliti bermaksud menuangkan kajian ini ke dalam sebuah penelitian berjudul: “Persepsi Politik Mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Konteks Pemilu 2024”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi politik mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap (DPD RI) Jawa Barat dalam Konteks Pemilu 2024?
2. Faktor-faktor apa yang membentuk persepsi politik mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap (DPD RI) Jawa Barat dalam Konteks Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi politik mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jawa Barat dalam Konteks Pemilu 2024.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi politik mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Konteks Pemilu 2024.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam studi mengenai persepsi politik dan proses sosialisasi politik terhadap lembaga perwakilan daerah. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi politik mahasiswa terbentuk terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Pemilu 2024 melalui interaksi dengan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan akademik, media massa, serta aktor politik.

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya penerapan teori budaya politik dari Almond dan Verba serta teori sistem politik dari David Easton dalam menjelaskan keterkaitan antara pemahaman, sikap, dan penilaian mahasiswa dengan dukungan terhadap lembaga perwakilan daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami kualitas

demokrasi elektoral yang tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasi, tetapi juga dari kualitas persepsi politik pemilih terhadap lembaga yang dipilih.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi penyelenggara pemilu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi politik, khususnya dalam memperkenalkan peran dan fungsi DPD RI Jawa Barat kepada masyarakat, terutama pemilih muda. Bagi lembaga DPD RI, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan pemahaman publik mengenai posisi dan peran DPD RI Jawa Barat sebagai lembaga perwakilan daerah dalam sistem politik nasional.

Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai persepsi politik, demokrasi elektoral, serta lembaga perwakilan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran politik secara lebih kritis. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan studi lanjutan dengan pendekatan, objek, maupun wilayah yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu politik.

Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam merancang program pendidikan pemilih yang tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi prosedural, tetapi juga pada penguatan kualitas persepsi politik pemilih terhadap lembaga-lembaga perwakilan, khususnya DPD RI. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menekan angka suara tidak sah pada pemilihan anggota DPD RI di masa mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Persepsi politik merupakan cara individu dalam memahami, merasakan, dan menilai suatu objek atau fenomena politik. Dalam penelitian ini, persepsi politik mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Pemilu 2024 dianalisis melalui dimensi kognitif,

afektif, dan evaluatif sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba.

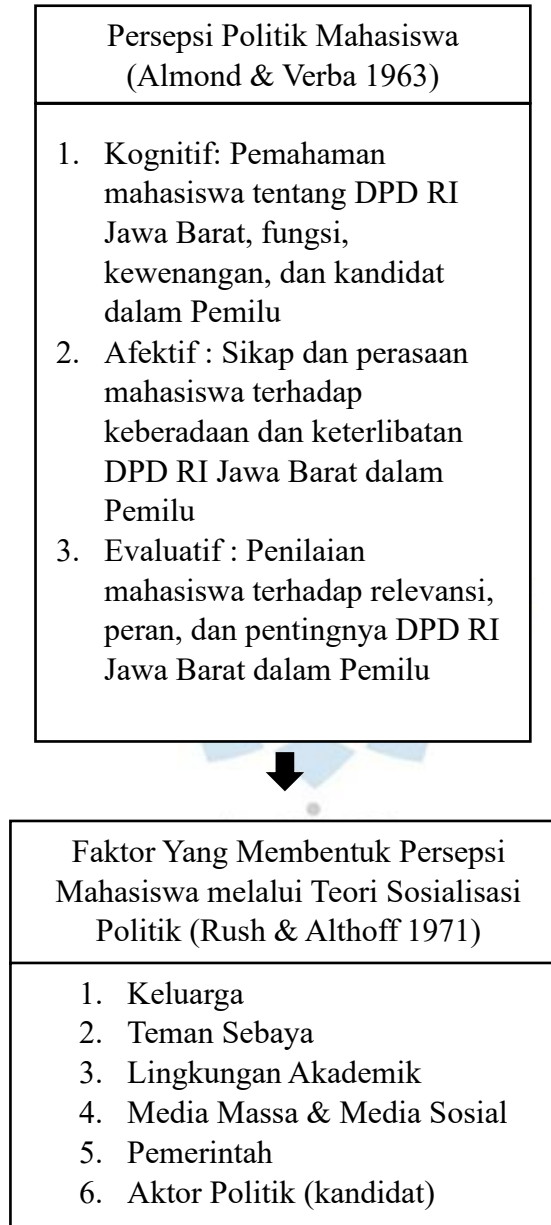
Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai DPD RI Jawa Barat, seperti fungsi, kewenangan, dan kandidat dalam Pemilu 2024. Dimensi afektif berkaitan dengan sikap, ketertarikan, dan perasaan mahasiswa terhadap keberadaan DPD RI Jawa Barat. Sementara itu, dimensi evaluatif berkaitan dengan penilaian mahasiswa terhadap peran, relevansi, dan pentingnya DPD RI Jawa Barat sebagai lembaga perwakilan daerah dalam sistem demokrasi.

Persepsi tersebut tidak terbentuk secara spontan, melainkan dibentuk oleh proses sosialisasi politik yang dialami mahasiswa. Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff, sosialisasi politik berlangsung melalui berbagai agen, seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan akademik, media massa dan media sosial, pemerintah, serta aktor politik (kandidat). Melalui interaksi dan paparan informasi dari berbagai agen tersebut, mahasiswa membentuk pengetahuan, sikap, dan penilaian terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Pemilu 2024. Proses pembentukan persepsi ini dapat berlangsung melalui berbagai mekanisme, seperti peniruan (imitasi), penyampaian informasi (instruksi), maupun dorongan internal (motivasi), yang secara keseluruhan membentuk cara pandang mahasiswa terhadap fenomena politik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, tahap kuantitatif digunakan untuk menggambarkan tingkat persepsi mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat berdasarkan dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif. Selanjutnya, tahap kualitatif digunakan untuk memperdalam dan memperkuat hasil kuantitatif melalui wawancara mendalam, khususnya untuk menjelaskan alasan di balik hasil persepsi mahasiswa serta mengidentifikasi faktor-faktor sosialisasi politik yang berkaitan dengan pembentukan persepsi mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat dalam Pemilu 2024.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami bagaimana persepsi politik mahasiswa terhadap DPD RI Jawa Barat terbentuk melalui proses sosialisasi politik dalam konteks demokrasi elektoral. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan untuk

menggambarkan tingkat persepsi mahasiswa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan persepsi tersebut.



Gambar. Kerangka Berpikir